



*Jateng*  
gayeng

# **IMPLEMENTASI OSS / PELAYANAN PERIZINAN ▶ BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DPMPTSP Provinsi JawaTengah

# MATERI

1. Latar Belakang
2. Dasar hukum OSS
3. NSPK dari K/L
4. Implementasi pembentukan Satgas
5. Fungsi satgas dalam pengawalan OSS
6. Kinerja satgas
7. Inventarisasi perizinan di DPMPTSP Prov. Jateng dalam rangka Implementasi PP 24/ 2018
8. Pokok-pokok pengaturan dalam PP 24 tahun 2018
9. Tujuan PP 24 tahun 2018
10. Jenis izin berusaha; Pemohon, & sektor – sektor perizinan berusaha
11. Pedoman dan tata cara pengajuan permohonan perizinan berusaha.

# LATAR BELAKANG

## PERTIMBANGAN YURIDIS

Melaksanakan ketentuan :

- Pasal 25 , UU 25 / 2007 ttg PM
- Pasal 6 & 7 UU 23 / 2014 ttg Pemerintahan Daerah yg telah diubah terakhir dg UU 9 / 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU 23 / 2014 ttg Pemerintahan Daerah

## SISTEM PERIZINAN BERUSAHA

Secara keseluruhan belum terintegrasi antara PTSP Pusat – Prov & Kab. / Kota.



## PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Paket Kebijakan Ekonomi I-XV yg dicanangkan pemerintah beberapa tahun lalu belum maksimal, karena masih terhambat dengan proses perizinan berusaha.

# DASAR HUKUM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)



# NSPK dari KEMENTERIAN/ LEMBAGA

1

Permen LH & Kehutanan RI. No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ttg NSPK Pelayanan Perizinan Terintegrasi Lingkup Kemen **LH & Kehutanan**

2

Permen Keuangan RI No. 71/PMK.04/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik di Bid. **Kepabeanan, Cukai, & Perpajakan**

3

Permen ESDM RI. No. 39 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Bidang **Ketenagalistrikan**

4

Permen Perdagangan RI. No. 77 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik di Bid. **Perdagangan**

5

Permen Pariwisata No. 10 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Sektor **Pariwisata**

6

Permen Kesehatan RI. No. 26 Th. 2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Sektor **Kesehatan**

7

Permen Pertanian RI. No. 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 ttg Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor **Pertanian**

8

Permen PU dan Perumahan Rakyat RI. No. 19/PRT/M/2018 ttg Penyelenggaraan **IMB Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi** Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

9

Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Th. 2018 ttg Perizinan Berusaha Terintegrasi Sec. Elektronik Sektor **Pendidikan dan Kebudayaan**

10

Per. BKPM RI No. 6 Th. 2018 ttg Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas **Penanaman Modal**.

# NSPK dari KEMENTERIAN/ LEMBAGA

11

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia :

a.

Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 89 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan di bidang laut

b.

Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 91 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan di bidang perkeretaapian

c.

Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 88 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan di bidang darat

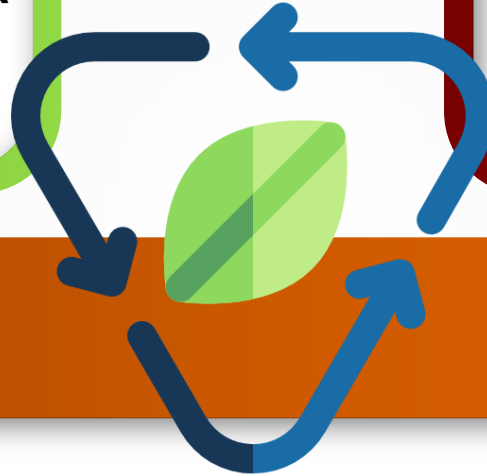
# IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATGAS

## PERPRES 91/ 2017

Percepatan pelaksanaan berusaha  
→ SATGAS

## PERMENKO PEREKONOMIAN 8/2017

Pedoman pelaksanaan  
Perpres 91/ 2017.



1. Prov. Jawa Tengah telah membentuk Satgas tingkat Provinsi (SK Gubernur No. 561/101 Th 2017 ttg Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah
2. Tingkat Kabupaten / Kota telah terbentuk 35 Satgas.

# IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATGAS



## GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 561/101 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BERUSAHA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah;





# Fungsi Satgas dalam Pengawasan OSS



- 1 Membentuk **LAYANAN PENGADUAN** (help desk & pusat informasi /call center)
- 2 Melakukan **penyelesaian hambatan** (debottlenecking) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh K/L dan Pemerintah Kab/Kota yang telah diajukan dan belum selesai
- 3 **Penyederhanaan proses perizinan** (debirokratisasi) yang mencakup penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha
- 4 **Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha yg baru** dg menerapkan penyederhanaan proses perizinan (debirokratisasi)
- 5 Meng**identifikasi kesiapan dukungan teknologi** dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan data daring (Online Single Submission) →internet dg bandwidth memadai.
- 6 Menyiapkan **pembiayaan dan SDM** dalam rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission

# KINERJA SATGAS

## JENIS IZIN YANG DISEDERHANAKAN DARI SEGI WAKTU DAN PERSYARATAN DI DPMPSTSP PROV JATENG (PERIODE JAN-MARET 2018)

NO	BIDANG	JENIS IZIN	YANG DISEDERHANAKAN	SEMULA	MENJADI
1	ESDM	Izin Pengeboran Air Tanah Perseorangan	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
2		Izin Pengeboran Air Tanah Badan Usaha	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
3		Izin Penggalian Air Tanah Perseorangan	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
4		Izin Penggalian Air Tanah Badan Usaha	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
5		Izin Pengusahaan Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
6		Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
7		Izin Pemakaian Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
8		Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah	Waktu Proses perizinan	39 Hari	28 Hari
9		Izin Pengeboran Air Tanah Perseorangan	Persyaratan Perizinan	16 syarat	15 syarat
10		Izin Pengeboran Air Tanah Badan Usaha	Persyaratan Perizinan	19 syarat	16 syarat
11		Izin Penggalian Air Tanah Perseorangan	Persyaratan Perizinan	15 syarat	14 syarat
12		Izin Penggalian Air Tanah Badan Usaha	Persyaratan Perizinan	18 syarat	15 syarat

Semarang, 7 Mei 2018

SEKRETARIS SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PERCEPATAN BERUSAHA

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, MSoc, Sc

JAWA TENGAH 19611115 198603 1 010



## GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 7 Mei 2018

Nomor : 503/0007879  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Pelaksanaan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi Jawa Tengah

Kepada Yth.  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Satgas Nasional  
Jl. Lap. Banteng Selatan No.2-4, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710  
di -  
JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2018 hal Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dengan hormat kami laporkan hal - hal sebagai berikut :

1. Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) tingkat Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah.
2. Pada tingkat Kabupaten/ Kota terbentuk 35 Satgas (data terlampir).
3. Bersama ini kami sampaikan laporan tentang :
  - a. Data jenis perizinan, persyaratan, dan dasar hukum pelaksanaan perizinan serta pelaksanaannya pada bulan Januari - Maret Tahun 2018 (data terlampir),
  - b. Penyelesaian masalah perizinan yang menghambat Investasi pada bulan Januari - Maret 2018 (data terlampir),
  - c. Data perizinan di DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan penyederhanaan pada Januari - Maret Tahun 2018 (data terlampir).

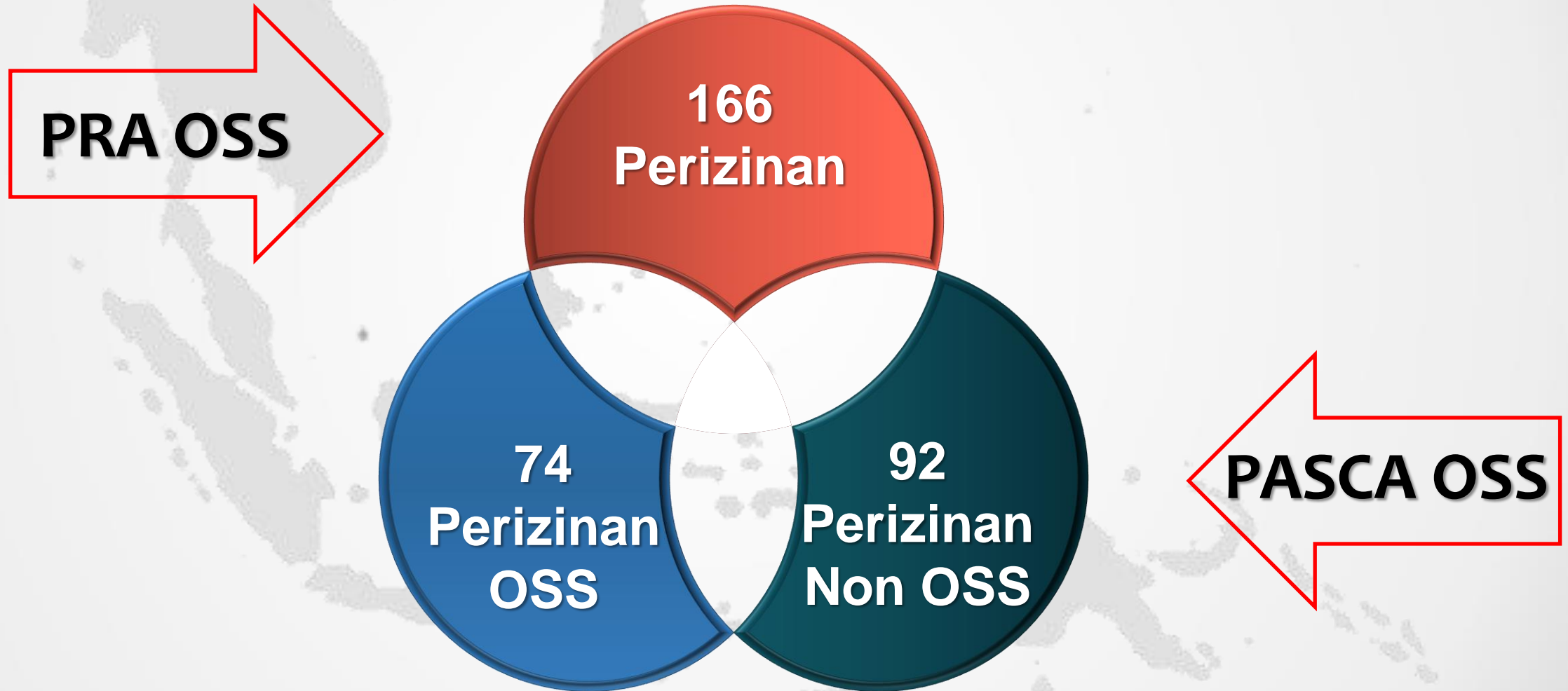
Demikian untuk menjadikan periksa.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Tengah  
Wakil Gubernur,

Dr. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si



# Inventarisasi perizinan di DPMP TSP Prov. Jateng dalam rangka Implementasi PP 24/ 2018





# Inventarisasi perizinan di DPMP TSP Prov. Jateng dalam rangka Implementasi PP 24/ 2018



NO	BIDANG	SEMULA	OSS	NON OSS
1.	Penanaman Modal	9 Izin	9 Izin	-
2.	Kelautan dan Perikanan	19 Izin	14 Izin	5 Izin
3.	Kehutanan	8 Izin	4 Izin	4 Izin
4.	Perhubungan	17 Izin	17 Izin	-
5.	Kesehatan	9 Izin	8 Izin	1 Izin
6.	Lingkungan Hidup	2 Izin	2 Izin	-
7.	Pendidikan	12 Izin	2 Izin	10 Izin
8.	Perindustrian dan Perdagangan	6 Izin	3 Izin	3 Izin
9.	Perkebunan	8 Izin	4 Izin	4 Izin
10.	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4 Izin	4 Izin	-
11.	Koperasi dan UMKM	3 Izin	2 Izin	1 Izin
12.	Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	5 Izin	-	5 Izin
13.	Sosial	1 Izin	-	1 Izin
14.	Pengelolaan Sumber Daya Air	3 Izin	-	3 Izin
15.	Pekerjaan Umum / Bina Marga	16 Izin	-	16 Izin
16.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	17 Izin	-	17 Izin
17.	Energi dan Sumber Daya Mineral	27 Izin	5 Izin	22 Izin
<b>Jumlah</b>		<b>166 Izin</b>	<b>74 Izin</b>	<b>92 Izin</b>



# **POKOK-POKOK PENGATURAN DALAM PP 24 TH. 2018**

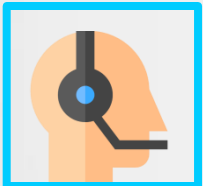
# Tujuan PP No 24 Tahun 2018



**Percepatan**, Peningkatan PM dan Izin Berusaha



**Penataan kembali sistem** pelayanan yg dilakukan oleh PTSP



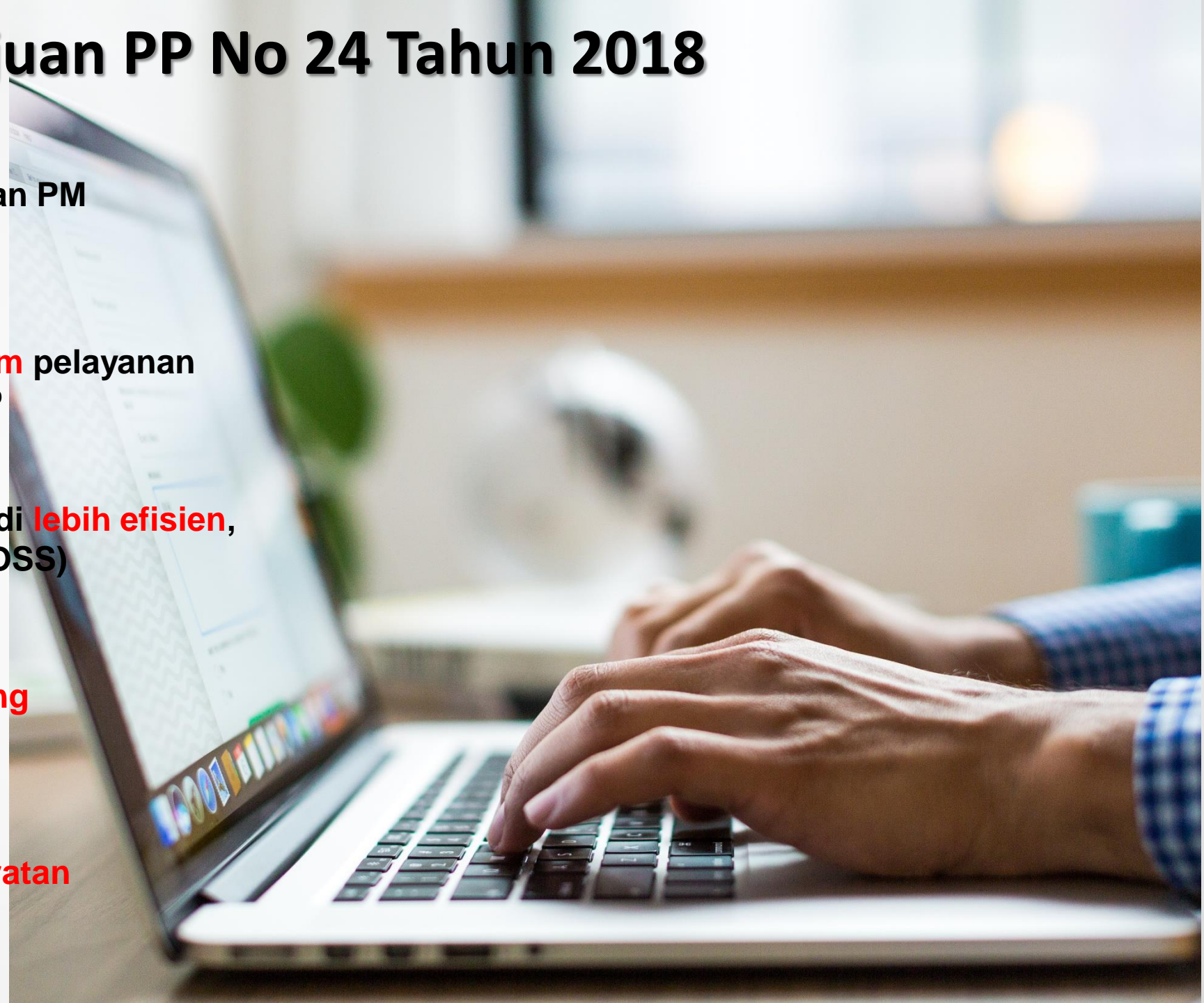
**Pelayanan** PTSP menjadi **lebih efisien**, Melayani dan Modern (OSS)



**Tersedianya data sharing** (End to end)

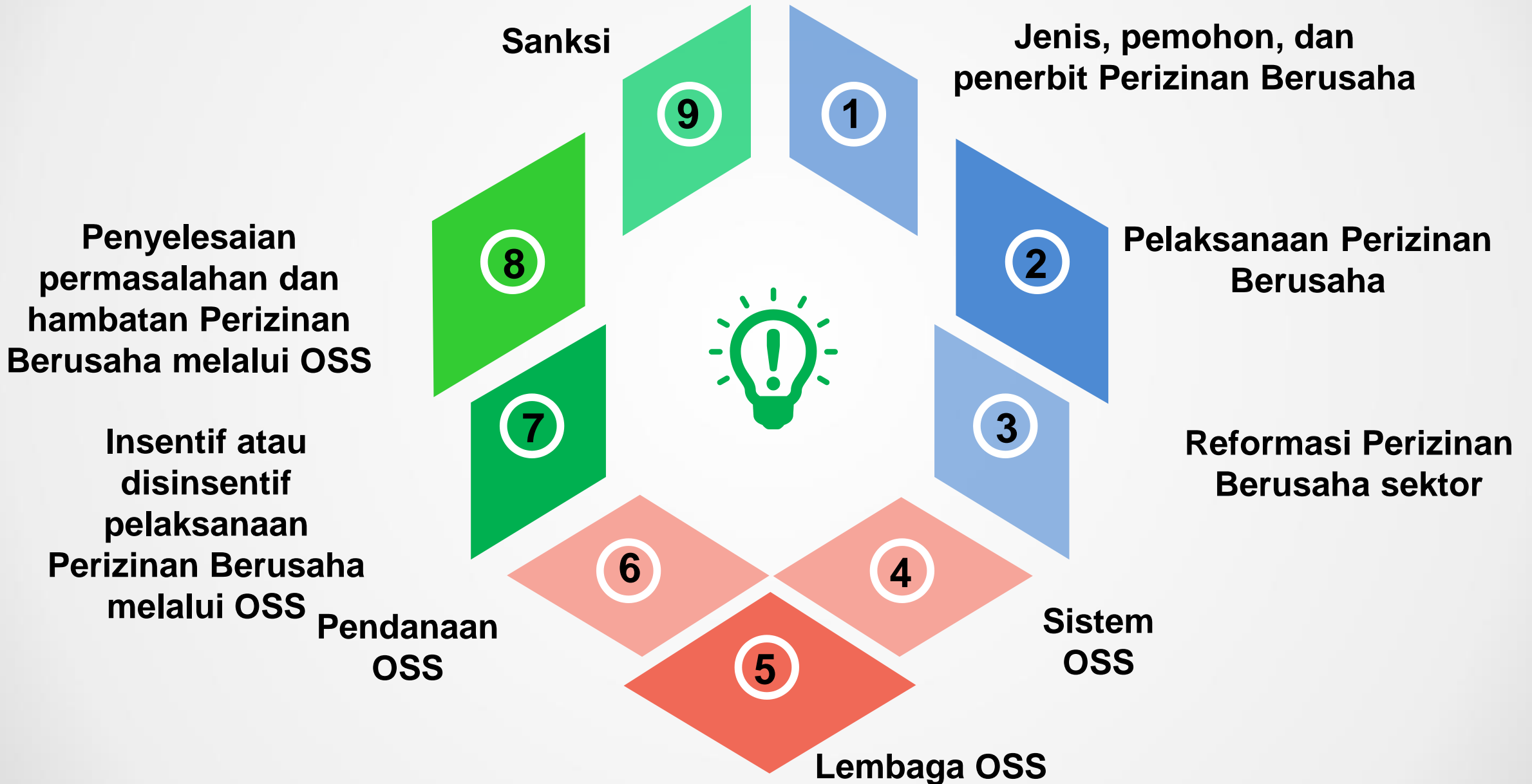


**Terstandarisasi persyaratan**



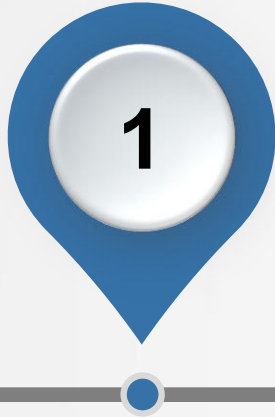
# Pokok-Pokok Pengaturan Dalam PP 24 2018

(Pasal 4)



# JENIS IZIN BERUSAHA (pasal 5)

## Tahap Persiapan

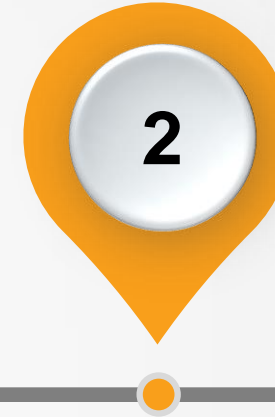


*Pengadaan tanah; Perubahan luas lahan; Pembangunan gedung & pengoperasiannya; pengadaan peralatan / sarana; pengadaan SDM; penyelesaian sertifikasi / kelaikan; pelaksanaan uji coba produksi (Psl.38).*

## IZIN USAHA

izin yg diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota, setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk **memulai usaha dan/atau kegiatan** sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen

## Tahap Produksi Komersial



## IZIN OPERASIONAL/ KOMERSIAL

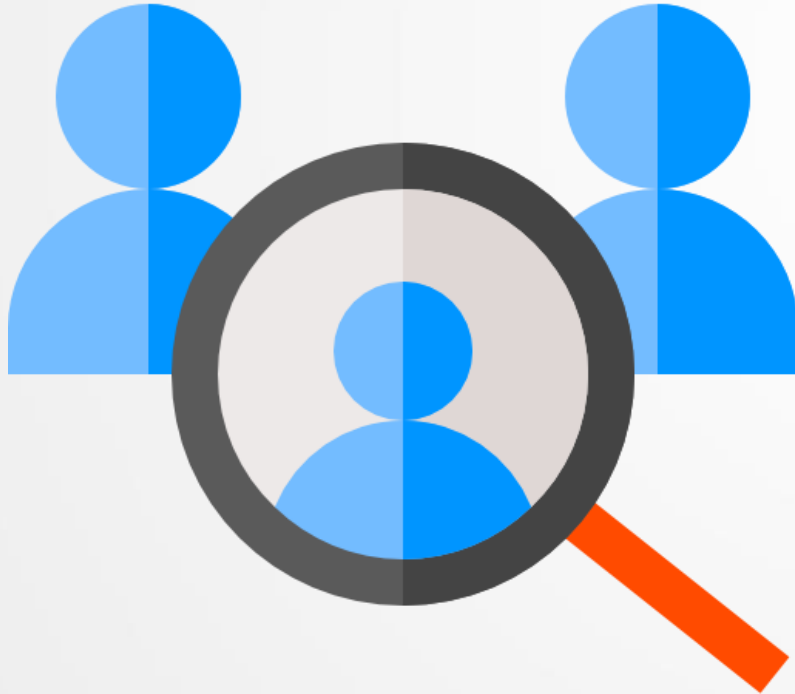
izin yg diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk **melakukan kegiatan komersial** atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.



# SIAPA SAJA PEMOHON ? (PASAL 6)

Perseorangan

Non  
Perseorangan



- a. Perseroan terbatas;
- b. **Perusahaan umum**;
- c. **Perusahaan umum daerah**;
- d. **Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh neg.**;
- e. Badan layanan umum;
- f. Lembaga penyiaran;
- g. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h. Koperasi;
- i. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
- j. Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*);
- k. Persekutuan perdata.

# Sektor – sektor perizinan berusaha (Psl 85)

1. Ketenagalistrikan;
2. Pertanian;
3. Lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
5. Kelautan dan perikanan;
6. Kesehatan;
7. Obat dan makanan;
8. Perindustrian;
9. Perdagangan;
10. Perhubungan;

11. Komunikasi dan informatika;
12. Keuangan;
13. Pariwisata;
14. Pendidikan & kebudayaan;
15. Pendidikan tinggi;
16. Agama dan keagamaan;
17. Ketenagakerjaan;
18. Kepolisian;
19. Perkoperasian & usaha mikro, kecil, menengah;
20. Ketenaganukliran.

## Pasal 86

Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan.

# Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi (Psl.20) :

Penerbitan Izin Usaha  
& Izin Komersial atau  
Operasional

Pendaftaran → NIB

Pemenuhan Komitmen  
Izin Usaha Izin  
Komersial atau  
Operasional

Pembayaran biaya

Pengawasan

Fasilitasi

Masa berlaku



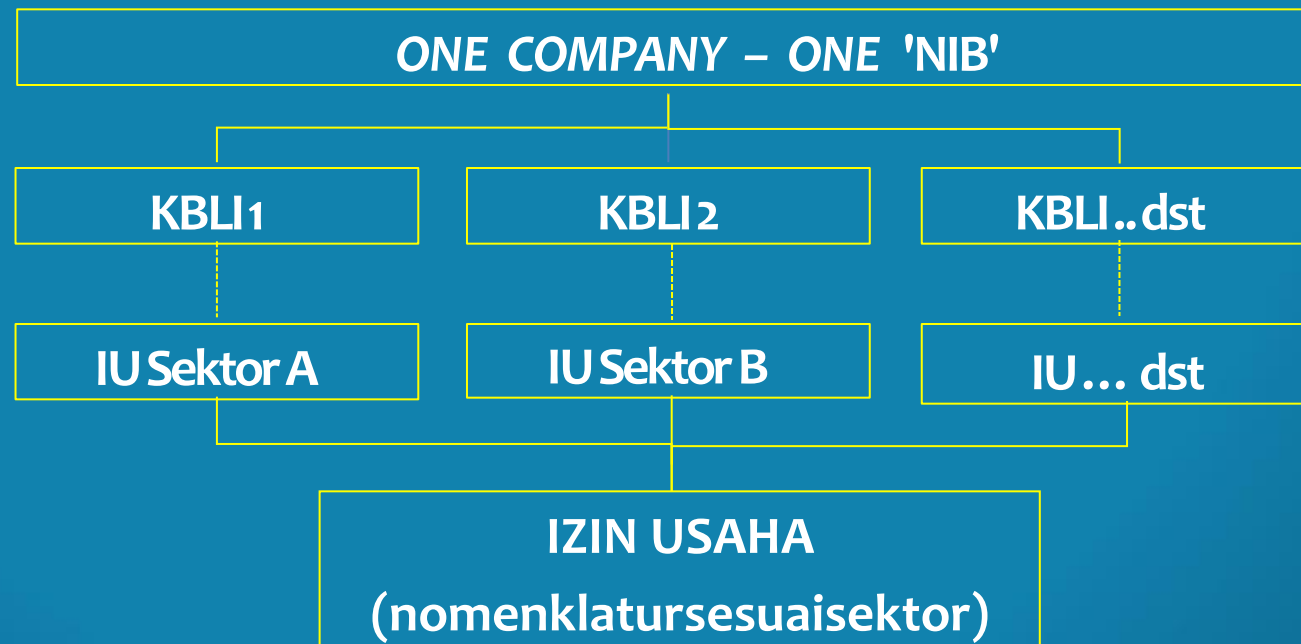
# POKOK-POKOK DALAM PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI 'OSS'

1



SEMUA JENIS USAHA diterbitkan melalui 'OSS', kecuali sektor pertambangan dan keuangan, serta properti & perumahan

2



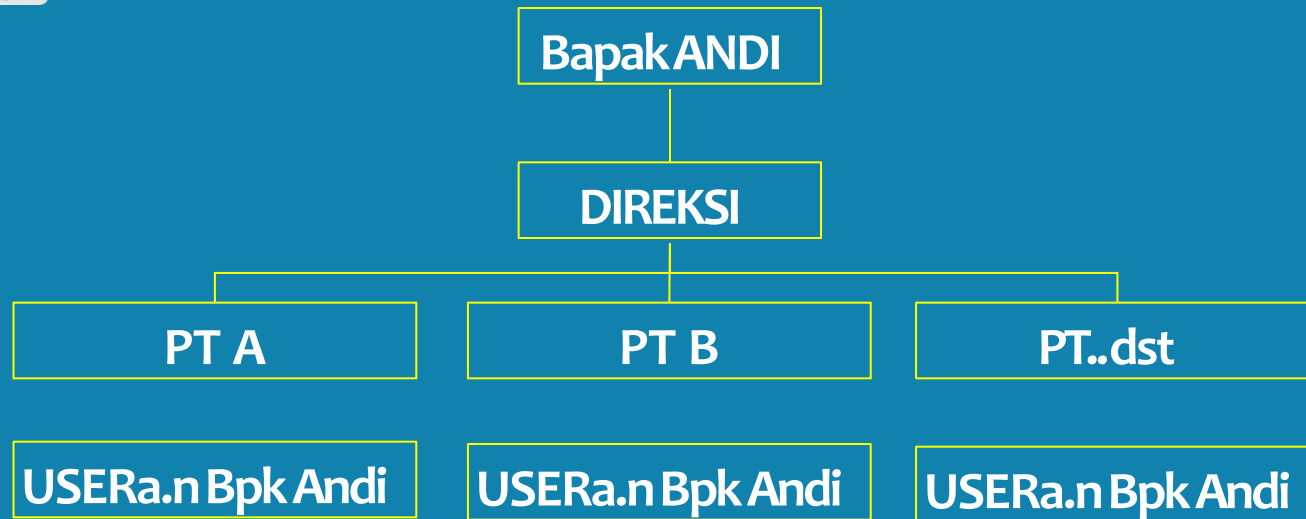
# POKOK-POKOK DALAM PP 24 TAHUN 2018 & IMPLEMENTASI 'OSS'

3



1 AKUN – untuk lebih dari 1 perusahaan

Registrasi menggunakan NIK / Paspor Direksi sebagaimana AKTA





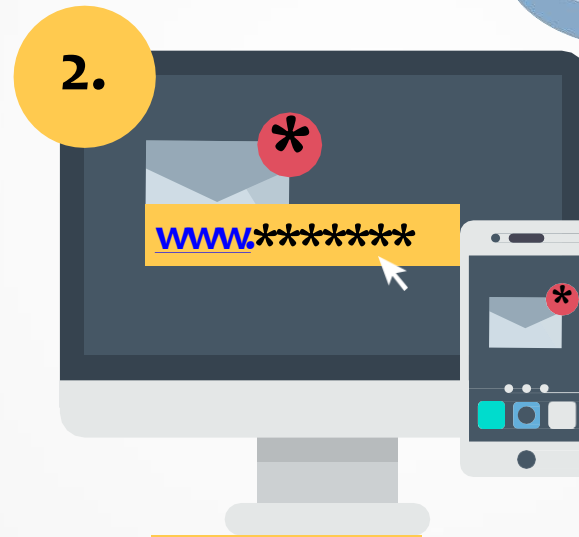
# **PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA**

**(PP 24 TH. 2018 TTG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK)**

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya yaitu Perorangan dan / atau Badan Usaha (termasuk UMKM) baru, maupun yang sudah berdiri, dan juga kantor perwakilan



1. Input **NIK** (PMDN) / **Paspor** (PMA) Direksi dan data lainnya



2. **AKTIVASI** melalui email perusahaan untuk mendapatkan **user id** dan **password**




3. Pelaku usaha menerima email berisi **User-ID** dan **Password**.

# CONTOH REGISTRASI OSS:

## STEP 0: PERMOHONAN HAK AKSES

### Form Registrasi

**\*) = Elemen Wajib di Isi**

<b>Jenis Identitas *)</b> <input type="text" value="Kartu Tanda Penduduk (KTP)"/>	<b>Nomor Induk Kependudukan (NIK) *)</b> <input type="text" value="Nomor Induk Kependudukan"/> <small>Bilain Nomor Identitas dari salah satu penanggung jawab yang tercantum dalam eita (untuk jenis pelaku usaha non perseorangan)</small>	<b>Email Perusahaan *)</b> <input type="text" value="Email"/> <small>Pastikan alamat email anda dapat menerima segala notifikasi dari sistem OSS.</small>
<b>Jenis Pelaku Usaha *)</b> <input type="text" value="Please select an item in the list."/>	<b>Nama (sesuai KTP) *)</b> <input type="text"/>	<b>Tanggal Lahir *)</b> <input type="text" value="tanggal-bulan-tahun"/> <small>Format : (dd-mm-yyyy)</small>
<b>Negara Asal *)</b> <input type="text" value="+62) - Indonesia"/>	<b>Nomor Telepon *)</b> <input type="text" value="Nomor HP (tanpa 0 di depan)"/> <small>Catatan : 085712545678 menjadi 85712545678</small>	<b>Website (optional)</b> <input type="text" value="Website"/>
<b>Kode Captcha *)</b>  <input type="text" value="MASUKKAN KODE CAPTCHA DI ATAS"/>		
<input type="checkbox"/> Saya mengerti dan menerima <b>Syarat dan Ketentuan</b> penggunaan sistem OSS		



# CONTOH AKTIVASI OSS:



## STEP 0: EMAIL AKTIVASI DAN USER-ID + PASSWORD

Administrator


### Registrasi OSS

Pendaftar yang kami hormati,  
Berikut adalah Akun Sistem OSS Anda:

Nama User  
Jenis Identitas / Nomor Identitas

Dengan ini dinyatakan bahwa registrasi oss anda berhasil. Untuk verifikasi akun anda silahkan klik tombol di bawah untuk aktivasi akun

**AKTIVASI**



Jika tombol tidak bisa di klik, silahkan copy paste link dibawah ini untuk aktivasi akun anda :  
<https://oss.go.id/ross/online/registrasi/verifikasi/A3YAag05XK0cFZU0s8BAAnA2jU0gEwV280YgkAAD8D00JqCTE0YD8uW2UkAEuUW0UP1R0CEfZ7JUTADawhWAD0CYFSgARNMIAzANW=>

### Registrasi Berhasil

Terima kasih Anda telah melakukan pendaftaran pada aplikasi Online Single Submission. Silahkan cek email kembali dan melakukan login di aplikasi dengan username dan password yang ada di email. Terima Kasih

Terima kasih.

### OSS

Administrator

### Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftar yang kami hormati,

Berikut adalah Data Perusahaan Anda:

Username	wahyudi.romdhani@gmail.com
Password	4Jpe5zunyN
Nomor Identitas	1671083005840005

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silahkan login pada aplikasi Online Single Submission menggunakan username dan password di atas.

Online Single Submission

Jakarta

HITUNGAN DETIK....

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah **IDENTITAS PELAKU USAHA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.



Log-in melalui [oss.go.id](https://oss.go.id)

Note : bentuk 13 digit,  
masa berlaku, pencabutan

Sumber: Kantor Kemenko Perekonomian, 2018



Input Data :

- Data perusahaan
- **NPWP**
- Data modal
- Data Akta
- Data Pengurus dan Pemegang Saham
- Maksud dan Tujuan Kegiatan (KBLI)
- Data Usaha



- Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan
- Dokumen pendaftaran lainnya dapat diterbitkan (jika diperlukan)

Psl.29



Ps I.28

Psl.23

Psl.30 (1)

# STEP 1: PENGISIAN DATA PERUSAHAAN – AKTA PENDIRIAN & PERUBAHAN

KEMBALI KE <https://oss.go.id> – LALU LOG-IN (KLIK "MASUK")

### Form Login

Username \*

Password \*

Kode captcha \*

**JAWA TIMUR**

Selamat datang di OSS.

OSS adalah Aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Jenis Identitas :	<input type="text"/>	Nomor Induk Kependudukan :	<input type="text"/>
Nama :	<input type="text"/>	Jenis Kelamin :	Perempuan
Tempat Lahir :	SULI	Tanggal Lahir :	01-12-1969
Daerah Asal :	Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Jatilasih, Kel. Jatikramat	Masa Berlaku KTP :	-
Website :	-	RT / RW :	007/002
Status Perkawinan :	KAWIN	Kewarganegaraan :	-
Pekerjaan :	KARYAWAN SWASTA	Agama :	ISLAM
Alamat :	KOMP.RATNA ASRI	Jenis User :	Public User (Investor Badan Hukum)
Telp :	<input type="text"/>	Email :	<input type="text"/>

Data sesuai dengan Data DUKCAPIL –

# NIB yang di Terbitkan melalui OSS (Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng)



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**8120005900946**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Koperasi KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI
Alamat Perusahaan	: Jalan Perintis Kemerdekaan No. 61, Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah
NPWP	: 21.029.625.7-501.000
Nomor Telepon	: (0283)6148393
Nomor Fax	: -
Email	: ksu_bum@yahoo.co.id
Nama KBLI	: Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah
Kode KBLI	: 64142
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 04 September 2018  
Perubahan ke-1



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

# NIB yang di Terbitkan melalui OSS (Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
8120017060586

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV HAMIZAN  
Alamat Perusahaan : JL. KARANGMANDING NO. 03 DK.  
PESANGGRAHAN, Kel. Purwodadi, Kec. Tonjong,  
Kab. Brebes, Prop. Jawa Tengah  
NPWP : 31.692.172.5-501.000  
Nomor Telepon : 081328459279  
Nomor Fax : -  
Email : cv.hamizan1@gmail.com  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 08 Oktober 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



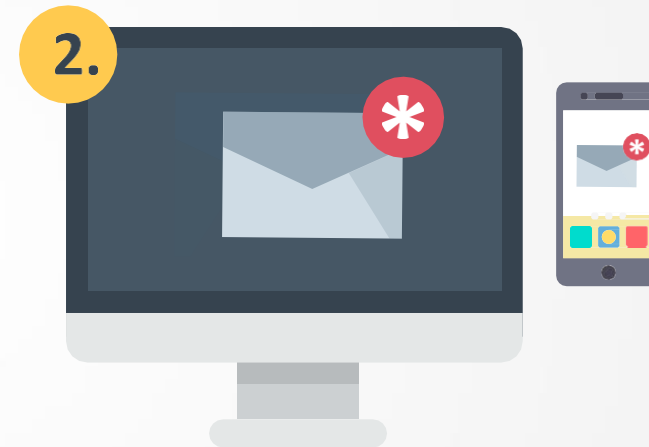
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
8120017060586

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	01132
2	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	01134
3	PERTANIAN TANAMAN RUMPUT-RUMPUTAN DAN TANAMAN PAKAN TERNAK	01191
4	JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA	01612
5	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	46203
6	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	46205
7	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	46207
8	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	46209
9	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	46692
10	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
11	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	47711
12	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT	47762
13	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	47763
14	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	47796

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha.



- Izin Usaha diterbitkan setelah pernyataan komitmen
- Setelah mendapat Izin Usaha, maka persiapan usaha dapat dilakukan

Izin Usaha berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi **KOMITMEN**, termasuk pembayaran PNBP (jika disyaratkan)



Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha **untuk memperoleh tanah** yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan

- ✓ RTRW
- ✓ PETA DIGITAL



Izin Lokasi diterbitkan secara otomatis

- ✓ RTRW
- ❓ PETA DIGITAL



Pengisian komitmen



Penerbitan Izin Lokasi



Penyelesaian komitmen

- ❓ RTRW
- ❓ PETA DIGITAL



Permohonan Izin Lokasi



Pengisian komitmen



Penerbitan Izin Lokasi



Penyelesaian komitmen

4.

**KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN LOKASI**

Izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang **wajib Amdal atau UKL-UPL** dalam rangka **perlindungan dan pengelolaan lingkungan** hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan



1.



- Pengajuan Izin Lingkungan melalui OSS
- Sistem OSS menerbitkan Izin Lingkungan.

2.



- Penyelesaian UKL-UPL: 15 hari kerja
- Penyelesaian AMDAL adalah 115 hari

5.

**KOMITMEN IZIN USAHA: IZIN LINGKUNGAN**



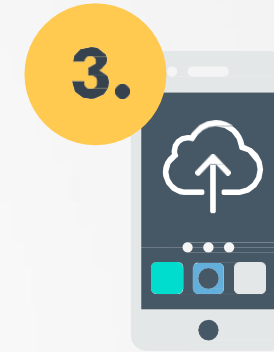
# Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung



- Pengajuan IMB melalui OSS
- Sistem OSS menerbitkan IMB (melalui **SIMBG** / sistem informasi Manajemen Bangunan Gedung) → Permen PUPR No.19/PRT/M/2018.
- Jangka waktu pemenuhan komitmen 30 hr
- SIMBG dioperasikan o/ Kab./Kota Psl.5 (4) Permen PUPR.



Pelaku usaha mendapatkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota dari DPMPTSP




Pelaku usaha memenuhi persyaratan komitmen



**KOMITMEN IZIN USAHA : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

# Izin Usaha yang di Terbitkan melalui OSS

## (Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng)

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**IZIN USAHA**  
**(Izin Koperasi Simpan Pinjam)**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Koperasi Simpan Pinjam** kepada:

Nama Perusahaan : Koperasi KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI  
Nomor Induk Berusaha : 8120005900946  
Alamat Perusahaan : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 61  
Nama KBLI : KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL SYARIAH  
Kode KBLI : 64142  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Jalan Prof. Moh. Yamin No.16  
- Desa/Kelurahan : Pakembaran  
- Kecamatan : Slawi  
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Koperasi Simpan Pinjam** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Izin Usaha**

Izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional



1.



- Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan Izin Operasional/Komersial;
- Sistem OSS otomatis menerbitkan Izin Operasional/Komersial.

2.



Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/komersial

3.

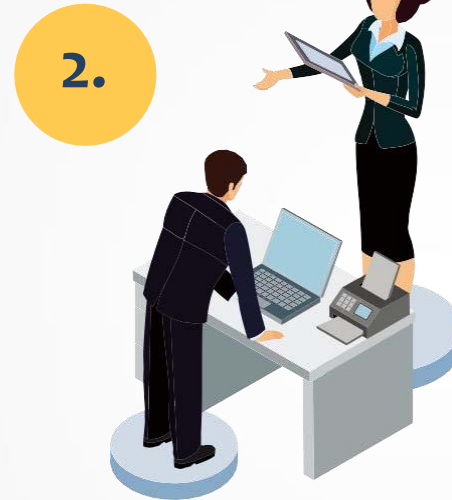


Sistem OSS mengaktifasi Izin komersial/Operasional

Setelah mendapatkan izin dengan mekanisme pernyataan komitmen melalui OSS, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP, PAD atau retribusi daerah dan melakukan konfirmasi pembayaran ke OSS



1. Pelaku Usaha menerima email dan notifikasi dari sistem OSS mengenai daftar izin yang sudah dimiliki.



2. Pelaku usaha membayar kepada instansi yang telah ditentukan.



3. Pelaku usaha mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS.

8.

**PEMBAYARAN**

Pengembangan usaha: **penambahan kapasitas, perluasan usaha pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang berbeda.**



Pelaku Usaha wajib memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS – jika di lokasi kab/kota sama



Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SFL) pada lokasi pengembangan usaha baru – jika di lokasi kab/kota yang berbeda

# Izin Operasional/ Komersial yang di Terbitkan melalui OSS (Pendampingan di DPMPTSP Prov Jateng)



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI  
Nomor Induk Berusaha : 8120005900946  
Alamat Perusahaan : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 61, Kel/Desa Kel. Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah  
Kode KBLI : 64142

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
2. Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*

**Izin Komersial**

# 7 LANGKAH Perizinan Melalui OSS

IZIN USAHA

IZIN KOMERSIAL/  
IZIN OPERASIONAL

02

01

03

04

05

06

07

Pembuatan  
Akun  
Pendaftaran →  
NIB.

**KOMITMEN :**

- IZIN LOKASI
- IZIN LOKASI PERAIRAN
- IZIN LINGKUNGAN
- IMB.
- .....

NOTIFIKASI

**KOMITMEN :**

1. DAFTAR /LIST IZIN-IZIN YG DIPERLUKAN DALAM RANGKA KEG. IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL/
2. PEMBAYARAN PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI

NOTIFIKASI



# Kendala dalam Pelaksanaan OSS

- **NSPK** sebagai syarat pemenuhan komitmen **belum sepenuhnya tersedia dari K/L**
- Sistem masih **perlu penyempurnaan**
- Izin Usaha dan Izin Komersial **belum berlaku efektif** karena mekanisme pemenuhan komitmen belum diatur dengan jelas
- **Produk** yang dikeluarkan **OSS belum dikenal** oleh masyarakat luas
- **Tidak ada transisi** dalam pelaksanaan OSS
- **Belum ada kejelasan regulasi terkait peran PTSP** dalam pengendalian dan pengawasan OSS





# Layanan Online Single Submisison

## Permasalahan

1. Sistem masih dalam proses pengembangan :
  - Pembagian kewenangan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga isi webform masih tercampur dengan kewenangan Kab/Kota lainnya
  - Integrasi dengan sistem milik K/L dan sistem daerah
2. Kapasitas SDM pelaksana OSS masih belum optimal
3. Koordinasi antar SKPD belum maksimal
4. Masyarakat belum sepenuhnya paham proses OSS

## RTL

1. Kab/Kota perlu menginventarisir permasalahan terkait pembagian kewenangan dan integrasi sistem yang dimiliki daerah
2. Perlu koordinasi dengan pusat terkait pembagian kewenangan dan integrasi sistem yang dimiliki daerah
3. Penguatan koordinasi dan persamaan persepsi antar SKPD di Pemerintah Prov, dan Kab/Kota
4. Kegiatan layanan OSS seperti jemput bola lintas Kab/Kota. Contoh : Layanan berbantuan OSS sektor kelautan dan perikanan di Kab.Rembang



# Kendala Teknis Sistem OSS

## Per Sektor Perizinan

Jateng  
gayeng



### Sektor Ketenagakerjaan :

- Persyaratan / NSPK Izin Penampungan TKI belum ada
- Kewenangan Izin Cabang P3MI dan Izin Penampungan belum ada



### Sektor ESDM dan Ketenagalistrikan :

Sedang dalam proses penyesuaian dari Izin Usaha menjadi Izin Komersial (IO Genset)



### Sektor Perhubungan :

Kementerian Perhubungan masih menerbitkan Izin Usaha secara manual



### Sektor Kelautan dan Perikanan :

- BPKP dalam PP No 24 Tahun 2018 berubah nama menjadi TDKP, namun saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah masih menggunakan nama BPKP
- Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menerbitkan Izin Usaha secara manual

- **Webform masih belum stabil** (contoh : urutan izin yang akan dinotifikasi tidakurut / acak mulai dari yang terbaru, preview dokumen yang sudah diupload sering tidak muncul dari sisi pemohon);
- **Belum ada mekanisme** untuk memberitahu pemohon agar pemohon **dapat segera memenuhi komitmen;**
- **Fungsi user turunan pada webform** belum dapat berjalan secara sempurna;



## Kendala dalam Notifikasi



# Mekanisme Pengaduan



**PELAPOR**

Investor/masyarakat menyampaikan pertanyaan/keluhan

## Kanal Komunikasi

1. Telepon
2. Email
3. Pengaduan melalui Sistem OSS



## Front-End Helpdesk

Dibawah Tim Pelaksana Satgas Nasional



Helpdesk Agents

## Satgas Nasional



Seluruh pelaporan di cc ke Satgas Nasional cq. Tim Pelaksana pada saat di broadcast ke satgas lain

## Satgas Nasional



Satgas K/L



Satgas Prov



Satgas Kab/kota



# PENDAMPINGAN DPMPSTSP DALAM PROSES PERIZINAN MELALUI OSS

*Jateng*  
gayeng



# Notifikasi melalui OSS/ web form

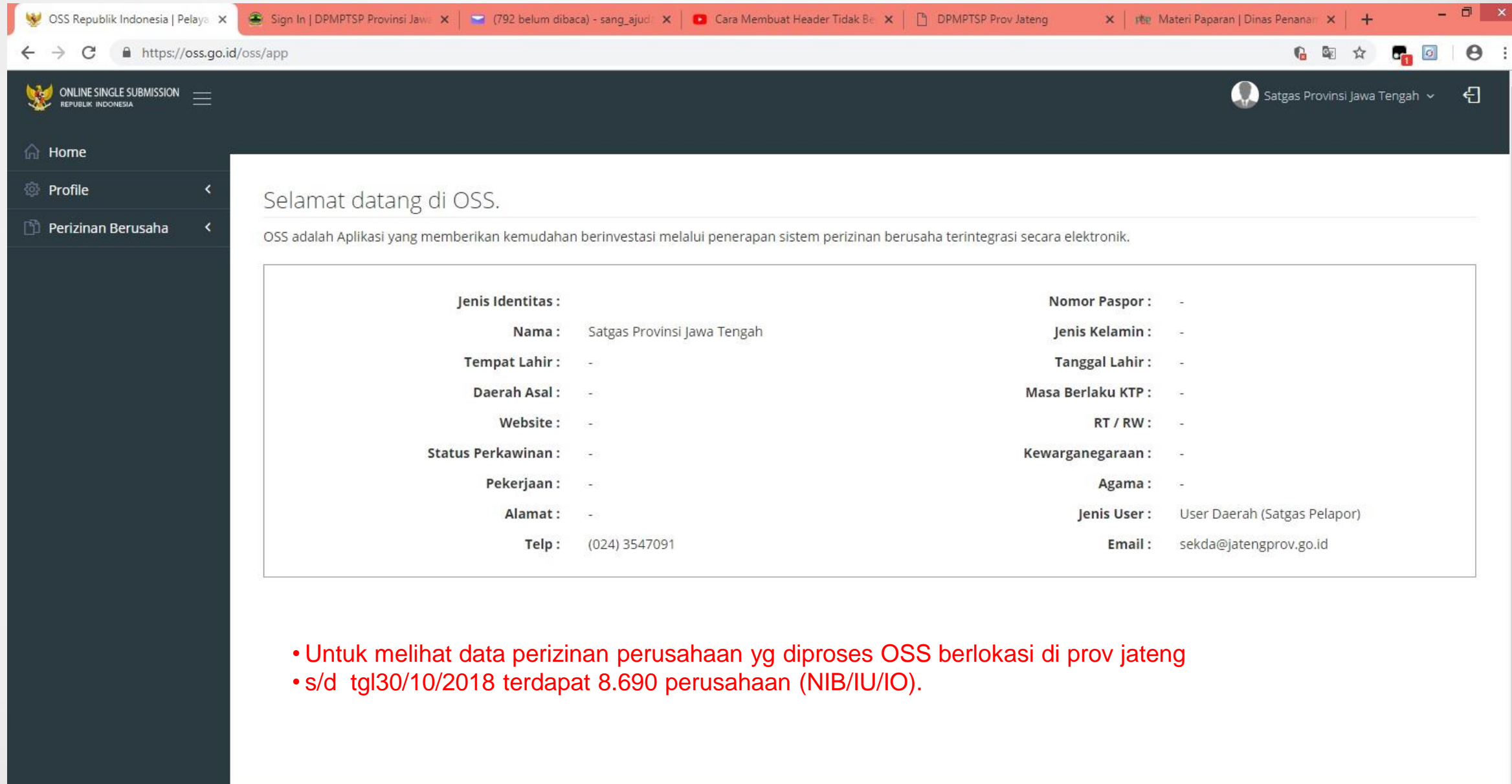
- Home
- Profile
- Perizinan Berusaha
- Web Form

Selamat datang di OSS.

OSS adalah Aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

<b>Jenis Identitas :</b>	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<b>Nomor Induk Kependudukan :</b>	-
<b>Nama :</b>	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	<b>Jenis Kelamin :</b>	-
<b>Tempat Lahir :</b>	-	<b>Tanggal Lahir :</b>	-
<b>Daerah Asal :</b>	-	<b>Masa Berlaku KTP :</b>	-
<b>Website :</b>	-	<b>RT / RW :</b>	-
<b>Status Perkawinan :</b>	-	<b>Kewarganegaraan :</b>	-
<b>Pekerjaan :</b>	-	<b>Agama :</b>	-
<b>Alamat :</b>	-	<b>Jenis User :</b>	User Daerah (PTSP)
<b>Telp :</b>	(024) 3563069	<b>Email :</b>	dpmpptsp@jatengprov.go.id

# Pengawasan oleh Satgas melalui OSS



Selamat datang di OSS.

OSS adalah Aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

<b>Jenis Identitas :</b>		<b>Nomor Paspor :</b>	-
<b>Nama :</b>	Satgas Provinsi Jawa Tengah	<b>Jenis Kelamin :</b>	-
<b>Tempat Lahir :</b>	-	<b>Tanggal Lahir :</b>	-
<b>Daerah Asal :</b>	-	<b>Masa Berlaku KTP :</b>	-
<b>Website :</b>	-	<b>RT / RW :</b>	-
<b>Status Perkawinan :</b>	-	<b>Kewarganegaraan :</b>	-
<b>Pekerjaan :</b>	-	<b>Agama :</b>	-
<b>Alamat :</b>	-	<b>Jenis User :</b>	User Daerah (Satgas Pelapor)
<b>Telp :</b>	(024) 3547091	<b>Email :</b>	sekda@jatengprov.go.id

- Untuk melihat data perizinan perusahaan yg diproses OSS berlokasi di prov jateng
- s/d tgl30/10/2018 terdapat 8.690 perusahaan (NIB/IU/IO).



# A. Layanan Berbantuan di DPMPSTSP Prov Jateng Tahun 2018

	Juli 2018	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018
Jumlah Pelayanan	121	144	130	121	126	110
Jumlah NIB	45	77	74	70	96	70
Jumlah Izin Usaha	29	35	18	37	56	27
Jumlah Izin Komersial	14	11	18	13	30	12
<b>TOTAL</b>	<b>209</b>	<b>267</b>	<b>240</b>	<b>241</b>	<b>308</b>	<b>219</b>



Layanan Berbantuan  
OSS  
di DPMPSTSP Jateng



Layanan Berbantuan OSS  
di DPMPSTSP Jateng





# Layanan berbantuan Lainnya



Layanan Berbantuan  
di Alun-Alun Blora



Layanan Berbantuan  
di Pesta Rakyat  
Pemalang



Layanan Berbantuan  
di CFD Simpang 5  
Semarang



Layanan Berbantuan  
di Prambanan, Klaten

- 
1. Layanan berbantuan di pameran PRPP Semarang
  2. Layanan berbantuan di Kab Rembang
  3. Layanan berbantuan di Kab Sragen
  4. dll



# Pelaksanaan Notifikasi dalam Rangka Pemenuhan Komitmen



No	Bidang	Ternotifikasi	Webform	Yanjin	Jumlah
1	Ketenagalistrikan	56	178	2	236
2	Air Tanah	11	72	10	93
3	Pendidikan	3	12	0	15
4	Perindustrian	0	151	0	151
5	Kesehatan	16	161	0	177
6	Perdagangan	0	62	0	62
7	LH dan Kehutanan	8	132	0	140
8	Pariwisata	0	103	0	103
9	Ketenagakerjaan	22	90	0	112
10	Obat dan Makanan	1	14	0	15
11	Pertanian	0	79	0	79
12	Koperasi	1	19	1	21
13	Kelautan Perikanan	16	397	5	416
14	Perhubungan	21	298	18	337
	<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>1768</b>	<b>34</b>	<b>1957</b>

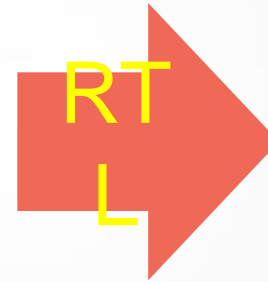


Telah terbentuk

**35 Satgas Kab/Kota**



**Fungsi satgas  
belum berjalan  
sempurna**



1. Penguatan tim satgas Kab/ Kota
2. Laporan kepada satgas nasional tentang perkembangan perizinan, penanganan pengaduan, penyederhanaan perizinan, dll



**Terima  
kasih!**

*Thank you!*





KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# USER MANUAL ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

- Untuk user role ptsp

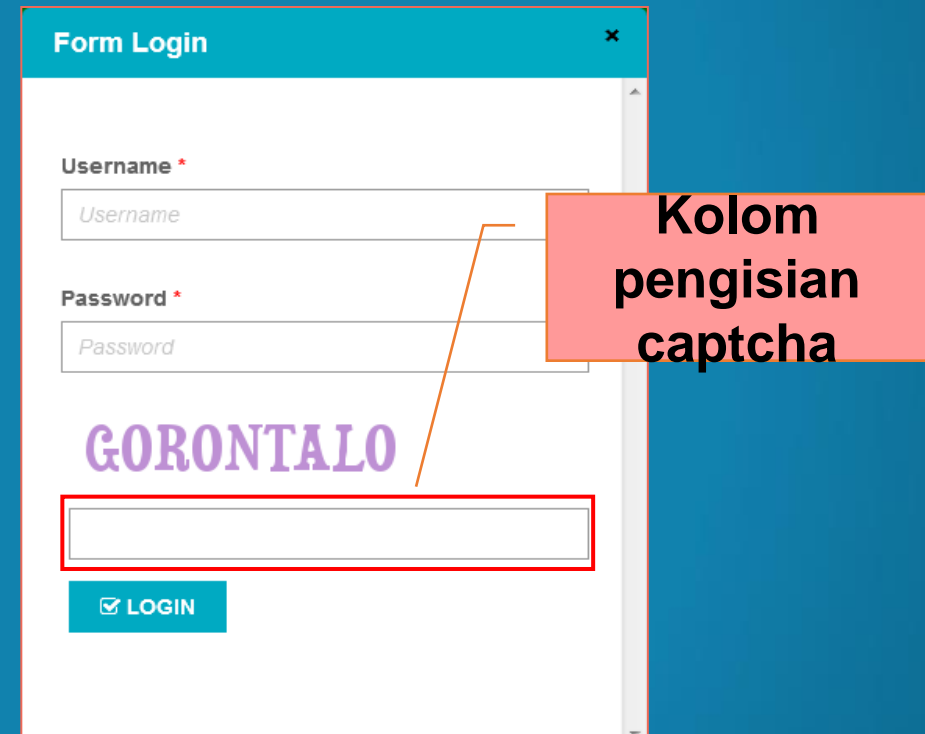
# 1. AKSES PORTAL OSS

User dapat mengakses laman web OSS (*url: <http://oss.go.id>*), *web browser* akan menampilkan laman berikut.



## 2. LOGIN (1)

Klik **MASUK** yang terdapat pada pojok kanan atas laman web OSS, aplikasi akan menampilkan form login seperti gambar berikut.



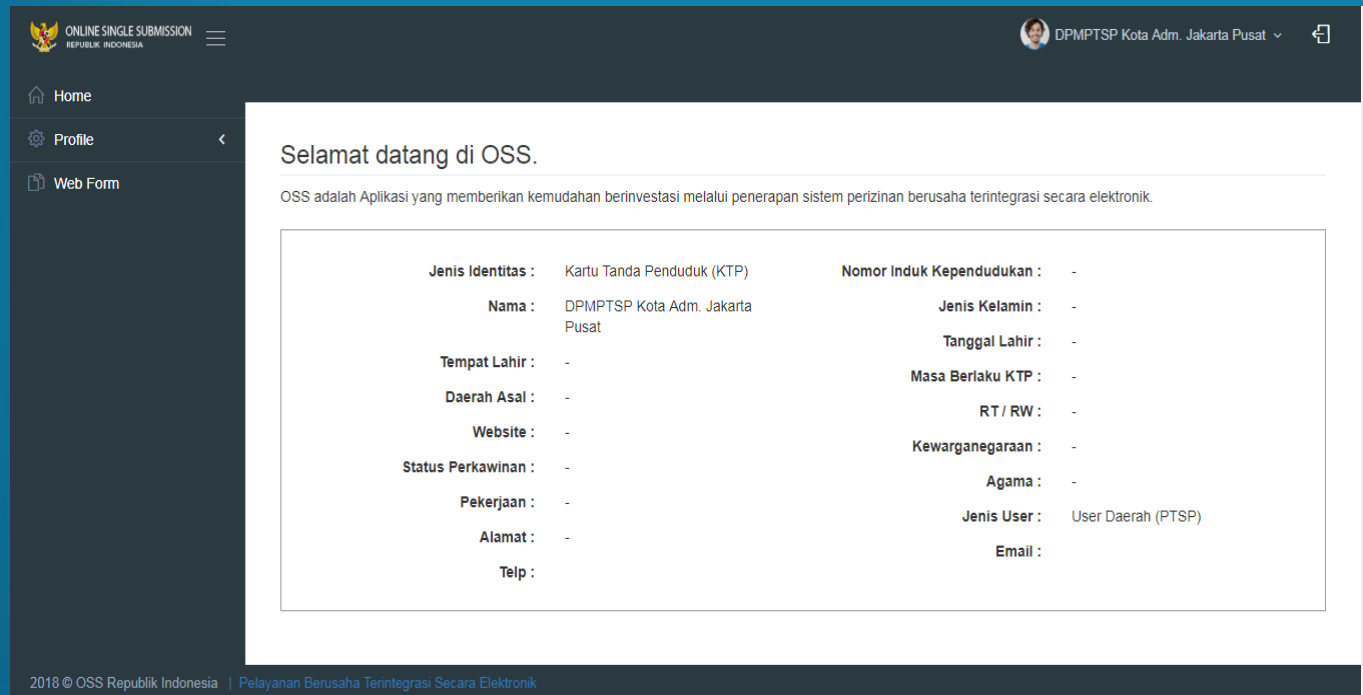
The image shows a 'Form Login' window with the following elements:

- Username \*** field with placeholder text 'Username'
- Password \*** field with placeholder text 'Password'
- A CAPTCHA image displaying the word **GORONTALO** in purple letters.
- A red rectangular box highlighting the CAPTCHA input area.
- A pink callout box with the text **Kolom pengisian captcha** pointing to the CAPTCHA field.
- A teal button labeled **LOGIN** with a checkmark icon.



## 2. LOGIN (2)

Jika proses login sukses, aplikasi akan menampilkan laman seperti gambar berikut.



The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) application interface. The header includes the logo of the Republic of Indonesia and the text "ONLINE SINGLE SUBMISSION REPUBLIK INDONESIA". The user is logged in as "DPMPTSP Kota Adm. Jakarta Pusat". The left sidebar contains navigation options: Home, Profile, and Web Form. The main content area shows a welcome message: "Selamat datang di OSS." followed by a description: "OSS adalah Aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik." Below this is a table of user profile information:

<b>Jenis Identitas :</b>	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<b>Nomor Induk Kependudukan :</b>	-
<b>Nama :</b>	DPMPTSP Kota Adm. Jakarta Pusat	<b>Jenis Kelamin :</b>	-
<b>Tempat Lahir :</b>	-	<b>Tanggal Lahir :</b>	-
<b>Daerah Asal :</b>	-	<b>Masa Berlaku KTP :</b>	-
<b>Website :</b>	-	<b>RT / RW :</b>	-
<b>Status Perkawinan :</b>	-	<b>Kewarganegaraan :</b>	-
<b>Pekerjaan :</b>	-	<b>Agama :</b>	-
<b>Alamat :</b>	-	<b>Jenis User :</b>	User Daerah (PTSP)
<b>Telp :</b>	-	<b>Email :</b>	-

At the bottom of the page, the footer text reads: "2018 © OSS Republik Indonesia | Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik".

# 3. PROFILE

Pada menu ini, user dapat melihat informasi mengenai profil yang telah didaftarkan.

The screenshot shows the 'Update Profile' interface. The sidebar on the left includes 'Home', 'Profile' (selected), 'User', and 'Web Form'. The main content area is titled 'Data Profile' and contains a form with the following fields:

Jenis Identitas :	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan :	-
Nama :	DPMPTSP Kota Adm. Jakarta Pusat	Jenis Kelamin :	-
Tempat Lahir :	-	Tanggal Lahir :	-
Daerah Asal :	-	Masa Berlaku KTP :	-
Website :	-	RT / RW :	-
Status Perkawinan :	-	Kewarganegaraan :	-
Pekerjaan :	-	Agama :	-
Alamat :	-	Jenis User :	User Daerah (PTSP)
Nomor Telepon :	<input type="text"/>	Email :	<input type="text"/>

At the bottom right of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Cancel'.

# 4. WEBFORM

Pada menu ini, pengguna dapat melihat seluruh permohonan perizinan yang ada. Pengguna juga dapat mengetahui status dokumen dan status izin serta melakukan evaluasi atau memberikan izin penerbitan.

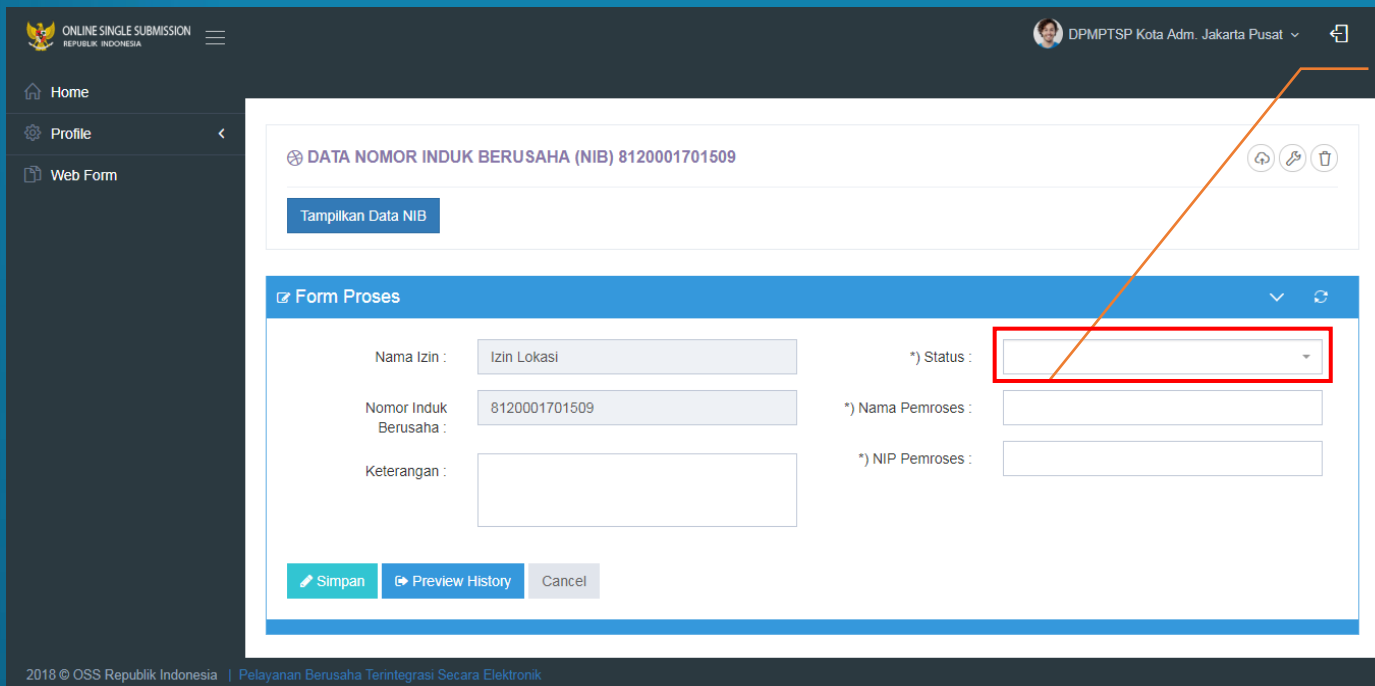
Pilih kolom yang ingin diproses untuk menampilkan tombol evaluasi dan penerbitan

No	Perusahaan	Nama Izin	Data Izin	Status Dokumen
1	8120001701509 SUNINDO KREASI ENERGY Alamat: -	010317100004 - Izin Lokasi	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima
2	8120001701509 SUNINDO KREASI ENERGY Alamat: -	010317100003 - Pemenuhan SLF	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima
3	8120001701509 SUNINDO KREASI ENERGY Alamat: -	010317100002 - Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima
4	8120000771003 CONNECTIONS INDO JAYA Alamat: -	010317100004 - Izin Lokasi	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima
7	8120000761406 YANSCO EXPORT IMPORT Alamat: -	010317100004 - Izin Lokasi	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima
8	8120000761406 YANSCO EXPORT IMPORT Alamat: -	010317100003 - Pemenuhan SLF	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima
9	8120000761406 YANSCO EXPORT IMPORT Alamat: -	010317100002 - Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima
10	8120000751304 Wedimek Indonesia Alamat: -	010317100004 - Izin Lokasi	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima

10 10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 10 Dari 21 Data. << Halaman 1 Go Dari 3 >>

## 5. EVALUASI (1)

Setelah pengguna memilih data izin pada menu webform, dan menekan tombol **Evaluasi** aplikasi akan menampilkan form evaluasi seperti gambar berikut.



The screenshot shows the 'Form Proses' (Evaluation Form) for a business license. The form is titled 'DATA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120001701509'. It contains several input fields and a dropdown menu. The 'Status' field is highlighted with a red box, indicating it is a key feature of the evaluation process. The form also includes buttons for 'Simpan', 'Preview History', and 'Cancel'.

Nama Izin :	Izin Lokasi	*) Status :	<input type="text"/>
Nomor Induk Berusaha :	8120001701509	*) Nama Pemroses :	<input type="text"/>
Keterangan :	<input type="text"/>	*) NIP Pemroses :	<input type="text"/>

**Pengguna dapat memilih status evaluasi antara lain, validasi, verifikasi pembayaran, inspeksi dan ditolak**

## 5. EVALUASI (2)

Pengguna diharapkan untuk melengkapi form yang tersedia dan memilih status evaluasi yang sesuai, jika proses evaluasi berhasil, maka status dokumen pada menu webform akan berubah seperti gambar berikut.

8120000710095 Almaviva Indonesia Kontak Alamat: -	010317100002 - Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))	Izin belum disetujui / masih proses	Validasi
--	---	-------------------------------------	----------

**Status dokumen  
setelah proses  
evaluasi**

## 6. PENERBITAN (1)

Jika pengguna menekan tombol **Penerbitan** aplikasi akan menampilkan form penerbitan seperti gambar berikut.

ONLINE SINGLE SUBMISSION  
REPUBLIK INDONESIA

DPMP TSP Kota Adm. Jakarta Pusat

DATA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120001701509

Tampilkan Data NIB

### Form Penerbitan

Nama Izin : Izin Lokasi Status : Disetujui

\*) Nomor Sertifikat : \*) Nama Penandatanganan :

\*) Tanggal Terbit (dd-mm-yyyy) : tanggal-bulan-tahun \*) NIP Penandatanganan :

\*) Tanggal Expired (dd-mm-yyyy) : tanggal-bulan-tahun \*) Jabatan Penandatanganan :

Keterangan : \*) URL Sertifikat :

Simpan Preview History Cancel

2018 © OSS Republik Indonesia | Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## 6. PENERBITAN (2)

Jika proses penerbitan berhasil, status data izin pada menu webform akan berubah menjadi seperti tampak pada gambar berikut.

17	<input type="radio"/>	8120000710095 Almaviva Indonesia Kontak Alamat: -	010317100002 - Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))	12162817281 Tgl Terbit : 2018-07-12 Tgl Exp : 2022-07-12	Disetujui
----	-----------------------	--	---	--	-----------

**Status data izin  
setelah proses  
penerbitan**